

Masyarakat Jejaring, Media Sosial, dan Transformasi Ruang Publik

Satya Anggara

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
satya.anggara@ui.ac.id

Herdito Sandi Pratama

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
herditosandi@ui.ac.id

Abstrak

Revolusi teknologi informasi telah menghasilkan masyarakat jejaring. Masyarakat jejaring ditandai oleh interaksi yang dimediasi oleh internet yang dalam pemikiran Manuel Castells dicirikan oleh *space of flows* dan *timeless time*. Logika jejaring bersifat inklusif dan eksklusif sekaligus. Inklusif dalam pengertian ia melingkupi nyaris seluruh dimensi kehidupan manusia, dari soal sehari-hari hingga soal interaksi pasar. Eksklusif dalam pengertian mereka yang tidak terlibat dalam jejaring (internet) akan mudah tereksklusi dalam interaksi sosial yang baru ini. Pada masyarakat jejaring, kuasa dan politik pun mengalami transformasi. Ruang publik meluas, dinamis, dan semakin interaktif berkat mediasi internet. Transformasi ruang publik ini kian mendifusi kekuasaan politik tidak lagi hanya berpusat pada otoritas politik melainkan meluruh ke publik. Sebagai contoh adalah lahirnya bermacam kelompok relawan yang tumbuh pesat dan mampu memiliki jaringan luas dalam waktu singkat tanpa perlu bertatap muka langsung. Berbagai upaya kreatif yang pada intinya berusaha untuk merangkul sebanyak mungkin kelompok masyarakat yang heterogen tergambar pula pada perubahan strategi kampanye dan kaderisasi yang mana kini lebih banyak menyasar kelompok usia di bawah 30 tahun sebagai target utamanya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih bersifat jangka panjang. Selain itu, peristiwa demokratisasi Arab (*Arab Spring*) pun dimungkinkan terjadi berkat pernyataan politik dan konsolidasi publik yang dilakukan melalui bantuan teknologi digital dan internet, dalam hal ini media sosial. Artikel ini akan merefleksikan transformasi ruang publik dalam masyarakat jejaring khususnya pada hal bagaimana demokratisasi menghadapi peluang sekaligus tantangan di dalamnya dan peran media sosial dalam interaksi politik baru antar masyarakat di tingkat akar rumput dengan otoritas politik serta para elit.

Kata kunci: politik, masyarakat jejaring, ruang publik, media sosial

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Revolusi Teknologi, yang geliatnya dimulai sejak tahun 1970 berkat invensi mikro-prosesor, menandai sebuah era baru yang menjadi lompatan besar dalam sejarah peradaban manusia semenjak Revolusi Industri¹. Revolusi kali ini berbeda dengan revolusi sebelumnya karena yang terjadi bukan hanya perkembangan pada teknologi yang mampu mengefisienkan kerja manusia semata, melainkan juga perubahan pada paradigma kerja manusia, kecepatan perkembangan teknologi yang tak lagi linear melainkan eksponensial, pergeseran modal serta fokus utama teknologi dari produk fisik menuju informasi, sampai konsep ruang dan waktu yang menjadi lingkungan hidup manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sehari-hari². Dalam sejarah, rasanya tak pernah umat manusia mengalami sebuah era yang amat dinamis, fleksibel, penuh ketidakpastian semacam ini.

Di tengah periode teknologi semacam ini, secara perlahan struktur sosial dan ruang publik mengalami transformasi mendasar, di mana seluruh orang yang hidupnya bersinggungan dengan teknologi terhubung di dalam jaringan global yang menghilangkan batas teritorial dan jarak, serta mengurangi secara signifikan waktu yang dibutuhkan di dalam proses interaksi. Konsekuensinya, kemungkinan interaksi dan perubahan strata sosial tumbuh secara liar. Sebuah berita dari suatu negara misalnya, mungkin butuh waktu sehari-hari untuk bisa sampai ke negara tetangga sebelum era revolusi teknologi berbasis informasi ini. Namun kini, bahkan sebuah pernyataan dari seorang tokoh bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia di saat yang bersamaan, menyebabkan reputasinya bisa naik atau turun dalam sekejap dan mempengaruhi karirnya seumur hidup.

Keseluruhan peristiwa revolusi teknologi informasi dan efek domino yang dimunculkan setelahnya sejatinya adalah awal dari sesuatu yang lebih besar bagi hampir seluruh bidang kehidupan manusia. Interaksi di dalam ruang publik yang berkembang dan membentuk jaringan raksasa adalah awal bagi transformasi yang lebih besar pada tataran dunia politik dan relasi kuasa yang terjadi di dalamnya. Arus informasi yang membawa pengetahuan serta kebaruan secara masif nyata berandil besar dalam membentuk ulang semangat bernegara, berserikat, serta berkumpul. Antar elit dengan elit, elit dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat terjadi perubahan cara pandang secara hierarkis.

¹ Castells, M., *The Rise of Network Society* (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd., 2010 [1996]) 28-53.

² Sheppard, E., "The Space and Times of Globalization: Place, Scale, Networks, and Positionality" dalam *Economy Geography*, 307-330. Sheppard, E., "The Space and Times of Globalization: Place, Scale, Networks, and Positionality" dalam *Economy Geography*, 307-330.

Meski secara struktur ideologi dan kelembagaan berikut dengan hiruk-pikuk yang terjadi di dalamnya masih terlihat sama, secara praktis jarak antar seluruh komponen dalam berinteraksi sudah tidak ada.

1.2. Masalah Penelitian

Apa yang menjadi hal penting untuk dipertanyakan ketika melihat bagaimana perkembangan teknologi informasi yang membentuk masyarakat jejaring mempengaruhi transformasi ruang publik dan politik dalam sebuah relasi kuasa, ada pada sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama terkait seberapa jauh peran media sosial sebagai wadah interaksi dalam jaringan itu sendiri. Apakah ia hanya sekedar media yang menghubungkan tiap orang saja, sebagai pusaran yang menyerap dan membagikan kekayaan informasi yang menjadi bahan bakar dalam perkembangan lanjutan, atau lebih daripada itu?

Kedua adalah mengenai pola interaksi yang terdapat di dalam masyarakat jejaring yang berserikat, berkumpul, serta berorganisasi secara politis. Apakah perbedaan kelompok menyebabkan lebih banyak interaksi yang bersifat hierarkis dan vertikal, atau justru malah meleburkan seluruh orang dalam jaringan ke dalam interaksi yang lebih bersifat setara dan horizontal? Apakah perpindahan kelas lantas menjadi sangat cair dan dinamis, atau justru semakin kaku dengan meluasnya ruang interaksi dan jaringan?

Ketiga yakni terkait dengan tantangan serta peluang yang mungkin hadir. Apakah pergolakan dan polarisasi yang kian kuat di dalam masyarakat yang awam dengan transformasi ruang publik ini akan semakin memburuk dan pada akhirnya meruntuhkan suatu lembaga itu sendiri, atau justru akan terjadi pendewasaan yang menyebabkan struktur lembaga menjadi stabil dan tahan uji? Bagaimana pula dengan tumbuhnya kritisisme di dalam masyarakat jejaring kepada lembaga? Apakah hadirnya akan menjadi sarana bagi percepatan atas perbaikan lembaga itu sendiri, atau justru memperlambat kinerjanya? Bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di masa depan? Apakah transformasi ini akan membuka jalan kepada lahirnya tokoh-tokoh potensial yang mampu menjadi pilar dalam lembaga dari berbagai kelompok masyarakat dalam jaringan, atau justru memperkuat kedudukan elit lama yang sudah terlebih dahulu memiliki modal sosial serta kapital? Keseluruhan pertanyaan ini dapat dirangkum menjadi sebuah pertanyaan besar terkait bagaimana nasib dari proses demokratisasi di era digital ini akan berjalan ke depannya, khususnya di Indonesia³.

³ Dalam hal ini penulis memperkecil cakupan pembahasan ke dalam negara Indonesia demi menawarkan analisis yang lebih spesifik, nyata, serta memiliki kemanfaatan langsung dalam tataran praktis.

1.3. Penelitian Terdahulu dan Kemaknawian Penelitian

Dapat dikatakan bahwa tidak banyak penelitian terdahulu yang menggunakan kata kunci ‘masyarakat jejaring’ sebagai titik berangkat penelitiannya, utamanya dalam konteks transformasi ruang public dan demokratisasi. Kendati demikian, ketika kata kunci yang digunakan sedikit berbeda⁴, terdapat beberapa penelitian yang memiliki persinggungan bahasan dengan tulisan ini. Penelitian dari Magnus T. Torfason dan Paul Ingram pada 2010, misalnya, mengambil fokus penelitian pada keberadaan *intergovernmental organizations* (IGOs) dengan menyatakan bahwa IGOs memfasilitasi difusi demokrasi dengan cara mentransmisikan informasi mengenai demokrasi sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi kepada negara-negara anggotanya dan juga menginterpretasikan informasi tersebut berdasarkan norma yang menjadi acuan masyarakat dunia⁵. Keduanya menggunakan *network autocorrelation model* untuk menelusuri perubahan situasi demokrasi di dunia pada periode tahun 1815 – 2000. Hasil penelusuran ini kemudian menjadi dasar untuk membuktikan peran IGOs sebagai media difusi secara normatif terhadap konsep-konsep demokrasi. Kendati ide dasarnya ada pada demokratisasi dengan bantuan penyebaran informasi dan gagasan melalui jaringan IGOs, penelitian ini belum menyentuh pembahasan mengenai peran media sosial dan jaringan internet dalam proses transmisi serta difusi.

Sementara pada penelitian lain yang dilakukan oleh Gerard van Bortel dan David Mullins pada 2009 lebih berfokus kepada apa yang disebut sebagai *network governance*. Di sini, keduanya hendak membuktikan klaim mengenai *network governance* sebagai sarana dalam rangka menjaga partisipasi komunitas dan integrasi sosial. Keduanya mencurigai bahwa perubahan bentuk pemerintahan dan organisasi masyarakat⁶ dari yang bersifat vertikal menjadi horizontal dengan asumsi bahwa hal tersebut dapat menciptakan situasi pembagian kekuasaan yang lebih setara, keterpercayaan yang lebih tinggi antar tiap partisipan, serta pengambilan keputusan secara kolektif sebagai janji yang mendahului bukti nyata di tataran praktis⁷. Maka dalam penelitian keduanya,

⁴ Dan oleh karenanya aspek yang dijadikan fokus penelitian pun menjadi berbeda dengan apa yang hendak disampaikan dalam tulisan ini.

⁵ Torfason, M. T.; dan Ingram, P., “The Global Rise of Democracy: A Network Account” dalam *American Sociological Review*, 355-377.

⁶ Termasuk di dalamnya negara.

⁷ Bortel, G. v.; dan Mullins, D., “Critical Perspectives on Network Governance in Urban Regeneration, Community Involvement and Integration” dalam *Journal of Housing and the Built Environment*, 203-219.

fokus yang mereka ambil ada pada penelusuran terhadap kegagalan serta keberhasilan dari *network governance* itu sendiri melalui contoh-contoh komunitas pluralistik yang terdapat di sejumlah negara. Penelitian keduanya dalam hal ini belum menyentuh secara langsung pembahasan mengenai demokrasi maupun demokratisasi di dalam konteks masyarakat jejaring, atau dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa demokrasi dianggap sudah ada begitu saja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan mengenai *network governance* sehingga keduanya merasa tidak perlu lagi bergerak mundur dan mengupas konsep demokrasi serta membuktikan eksistensinya di dalam *network governance*.

Maka dengan berkaca dari apa yang telah ditemukan oleh kedua penelitian tersebut, penulis dalam artikel ini hendak menasar apa yang terkandung di dalam korelasi antara konsep masyarakat jejaring dengan proses demokratisasi itu sendiri. Ini mencakup tidak hanya bagaimana keduanya dapat berkorelasi dalam berbagai peristiwa, melainkan apa saja dampak yang mungkin tercipta pasca korelasi yang terbentuk. Selain itu, berbeda dengan kedua penelitian di atas yang menekankan pada aspek sosiologis dan komunal, penulis dalam artikel ini hendak mengupas aspek politis serta filosofis dari transformasi ruang publik serta demokratisasi sebagai akibat dari fenomena masyarakat jejaring. Secara politis, fenomena ini membuka babak baru dari sistem kekuasaan dalam masyarakat jejaring itu sendiri. Secara filosofis, keberadaan masyarakat jejaring dan fenomena difusi kekuasaan juga memicu timbulnya pertanyaan mengenai eksistensi, khususnya mengenai siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai.

1.4. Metodologi Penelitian

Artikel ini secara keseluruhan akan dibangun dengan mendasarkan metodologi penelitiannya kepada studi literatur dan analisisnya terhadap data-data serta temuan empiris yang ada di lapangan. Terkait studi literatur, bahan yang akan dijadikan acuan utama adalah volume pertama dari tulisan Manuel Castells berjudul *The Rise of Network Society* yang merupakan bagian dari kesatuan tiga seri bukunya berjudul *The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Bahan ini akan penulis jadikan kacamata perspektif utama yang ditopang oleh sejumlah jurnal dan artikel mutakhir yang mengomentari, mengembangkan, serta mengkritisi lebih lanjut gagasan Manuel Castells dalam bahan ini.

Terkait dengan bahan yang dijadikan sebagai basis analisis, artikel ini akan mengangkat dua contoh kasus secara garis besar. Keduanya yakni peristiwa Demokratisasi Arab (*Arab Spring*), serta munculnya gerakan relawan politik di Indonesia beberapa tahun belakangan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan

perubahan strategi pada seluruh partai politik. Melalui pendekatan ini, pada bagian akhir diharapkan akan dihasilkan kesimpulan deskriptif⁸ yang dapat menjadi penjelasan atas fenomena transformasi ruang publik dan masyarakat jejaring, khususnya pada ranah politik. Dengan kesimpulan ini juga akan terlihat bagaimana pola yang terbentuk di dalam dunia baru ini untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam memprediksi arah gerak politik dan demokrasi beberapa tahun ke depan.

⁸ Sejalan dengan tujuan awalnya, tulisan ini tidak bermaksud memberi kesimpulan normatif yang di dalamnya berusaha mengarahkan fenomena yang dikaji ke arah tertentu. Penulis di sini lebih berfokus pada proses pembacaan atas fenomena melalui kacamata teoretis agar logika yang terdapat di baliknya menjadi lebih jelas terlihat.